WALIKOTA LANGSA PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2015 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 🕟

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang: a.

- bahwa adanya perkembangan/perubahan atas asumsi kebijakan umum APBK Langsa Tahun 2015 antara kegiatan dan jenis belanja menyebabkan sisa lebih APBK Langsa Tahun 2015 dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun 2015 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-43 Tahun 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
 - 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 - 9. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acéh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 - 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 - 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4.

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
- 29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 33. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 190);
- 34. Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 16);
- 35. Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 9).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun ^{**}2015 semula sejumlah Rp. 79£.095.693.423,00,- bertambah sejumlah Rp. 75.245.799.785,69,- sehingga menjadi Rp. 870.341.493 208,69,- dengan rincian sebagai berikut :

0/0	.341.493 208,69,- dengan rincian	seba	gai benkut :		
1.	Pendapatan Daerah				
	a. Semula	Rp	778.131.954.914,00	/	
	b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	40.026.003.208,00		
	Jumlah Pendapatan Setelah P	eruba	than	Rp	818.157.958.122,00
2.	Belanja Daerah:				
	a. Semula	Rp	795.095.693.423,00		
	b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	75.245.799.785,69		
	Jumlah Belanja Setelah Perub			; Rp	870.341.493.208,69
	Surplus /	(Defis	sit) Setelah Perubahan	Rp	(52.183.535.086,69)
3.	Pembiayaan Daerah:				
	a. Penerimaan		ji ji		
	1. Semula	Rр	17.563.738.509,00		
	Bertambah / (Berkurang)	Rp	35.119.796.577,69		
	Jumlah Penerimaan Setela	h Per	ubahan	Rp	52 583 535 086 69

					02.000.000,00
. 1	Pengeluaran		•		
	I. Semula	Rp	600.000.000,00		
2	2. Bertambalı / (Berkurang)	Rp	(100.000.000,00)		
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp	500.000.000,00	
			to Setelah Perubahan	'Rp	52.183.535.086,69
	Sisa Lebih Pembiayaan A	nggara	ın Setelah Perubahan	Rp	0

Pasal 2

1.	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
	a. Pendapatan Asli Daerah	

	1.	Semula	Rp	110.346.992.330,00		
			Rp	4.183.002.011,00		
		Jumlah Pendapatan Asli D	aerah	Setelah Perubahan	Rp	114.529.994.341,00
b.	Da	na Perimbangan				
	1.	Semula	Rp	494.789.923.000,00		
		Bertambah / (Berkurang)	Rp	20.328.470.509.00		
		Jumlah Dana Perimbangar	Setel	ah Perubahan	Rp	515.118.393.509,00

_		n .	
С.	Lain-Lain	Pendapatan	Yang Sah

b.

1.		ĸр	172.995.039.584.00	
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	15.514.530.688,00	
	Jumlah Lain-Lain Pendapa	tan Y	ang Sah Setelah	
	Perubahan			R

Rp 188.509.570.272,00

2. Pendapaan Asli Daerah .

1. Semula Rp 3.993.942.937,0 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 1.411.481.803,0 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	0_	5 405 404 545
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1. Semula Rp 451.000.000,00 2. Bertumbah / (Berkurang) <u>Rp</u> 67.845.242,00	Rp	5.405.424.740,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dip	isahka	ın
Setelah Perubahan	Rp	518.845.242,00
d. Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah 1. Semula Rp 2 101 540 202 00		,
2. Bertambah / (Berkurang) Rp		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp	2.191.549.393,00
e. Lain-láin Pendapatan Asli Daerah yang sah 1. Sémula Rp 95.170.500.000,00 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 1.693.674.966,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	-	
• •	Rp	96.864.174.966,00
 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hura. Dana Bagi Hasil Semula Bertambah / (Berkurang) Rp 25.091.140.000,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan 		
b. Dana Alokasi Umum	Rp	25.295.675.509,00
 Semula Rp 425.446.753.000,00 Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan 	Rp	425.446.753.000,00
c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula Rp 44.252.030.000,00 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 20.123.935.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus Setahan		•
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksuc c terdiri dari:	Rp	64.375.965.000,00
c terdiri dari: a. Pendapatan Hibah	l pada	angka 1 huruf
1. Semula Rp		
2. Bertambah / (Berkurang) Rp		
Jumlah Hibah Setelah Perubahan b. Dana Darurat	Rp	-
I. Semula Rp		
2. Bertambah / (Berkurang) <u>Rp</u> Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan F		
	₹p	•
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 1. Semula Rp 17.135.561.925,00 2. Bertambah / (Berkurang)		ra.
	tah P	17.135.561.925,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1. Semula Rp 73.932.862.312,00 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 15.514.530.688,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	p	89.447.393.000,00
e. Bantum Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daera 1. Semula Rp 81.926.615.347,00 2. Bertambah / (Berkurang)	n lainn	ya
Jumlah Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemerintah De Lainnya Setelah Perubahan		81.926.615.347,00
F. L. 147		

	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		Rp 413.969 587 554 36
	b. Belanja Langsung 1. Semula Rp 402.456.813.843,00 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 53.915.091.811.33	0 · 3	
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	R	p 456.371.905.654,33
	2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada angka jenis belanja: a. Belanja Pegawai Sejumlah 1. Semula Rp 367.998.203.268,00 2. Belanjah / (Berkurang) Rp 7.703.542.286,36)	uruf a terdiri dari :
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	R	375.701.745.554,36
	b. Belanja Bunga 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rr	
	c. Belanja Subsidi		•
	Semula Rp Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp	
	d. Belanja Hibah 1. Semula Rp 1.735.000.000,00 2. Berfambah / (Berkurang) Rp 90.000.000,00 Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	•	
	e. Belanja Bantuan Sosial	Νр	1.825.000.000,00
	1. Semula Rp 5.984.862.000,00 2. Bertambah / (Berkurang) Rp (3.071.305.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	., D-	(e
	f. Belanja Bagi Hasil	Rp	2,913.557.000,00
	Semula Rp Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	_	
	g. Belanja Bantuan Keuangan 1. Semula Rp 16.420.814.312.00 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 16.706.830.688,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp Rp	33 107 645 000 00
	h. Belanja Tidak Terduga	ĸφ	33.127.645.000,00
	1. Semula Rp 500.000.000,000 2. Bertambah / (Berkurang) Rp (98.360.000,00)	Зp	401.640.000,00
3.	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf		erdiri dari ionia
	a. Belanja Pegawai 1. Semula Rp 70.582.544.709,00 2. Bertambah / (Berkurang) Rp (696.894.520,00)	.~ `` ₹p	
•	b. Belanja Barang dan Jasa 1. Semula Rp 169.525.541.140,00 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 18.711.133.207,33	•	69.885.650.189,00
	c. Belanja Modal 1. Semula Rp 162.348.727.994,00 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 35.900.853.124,00 Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan R		188.236.674.347,33 198.249.581.118,00
	Pasal 4		
۱.	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdira. Penerimaan	ri da	ri :

1:

1. Semula ...

2. Penerimaah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayasa; a. Sisa lejkih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 1. Serjula Rp 17.563.738.509.06 2. Bertambah / [Berkurang] Rp 35.119.796.577.00 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan Rp 52.683.535.086.00 b. Pencairon Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp Sp Jumlah Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp Indinah Rp Indinah Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1. Semula Rp Jumlah Rehal Penjuahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Perubahan Rp Indinah Rp Indin	2. Bertambah/(Berkurang) Rp (100.000.000,00)
a. Sisa lejsh Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SLPA) 1. Setjula Rp 17.563.738.509,09 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 35.119.796.577,00 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SLPA) Setelah Perubahan Rp 52.683.535.086,00 b. Pencairon Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Hasil Penjudahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Hasil Penjudahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perupahan Rp d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah Setelah Perubahan Perubahan Rp e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Pinjaman Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Pinjaman Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Penebahan Rp enerimaan Piutang Daerah Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp Penebahan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp Penephahan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Peneriman Rp Jumlah Pener	Jamlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 500.000.000,0
a. Sisa lejsh Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 1. Setjula Rp 17.563.738.509,09 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 35.119.796.577,00 Jumiah Sisa Lebis Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan Rp 52.683.535.086,00 b. Pencairon Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp Jumiah Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumiah Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumiah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumiah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perupahan Rp d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumiah Penerimaan Pinjaman daerah Setelah Perubahan Rp erubahan Rp e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumiah Penerimaan Finjaman Setelah Perubahan Rp f. Penerimaan Piutang Daerah Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumiah Peneriman Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp enbiayagan Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumiah Peneriman Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp pembahan Dana Cadangan Sejumlah Rp 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumiah Peneriman Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp Perubahan Dana Cadangan Sejumlah Rp 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumiah Peneriman Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp Perubahan Dana Cadangan Sejumlah Rp 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumiah Peneriman Modal Setelah Perubahan Rp Penbayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumiah Peneriman Modal Setelah Perubahan Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumiah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jumiah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jumiah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumiah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumiah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumiah Pemberian Punjaman Daerah Pandan Ppudan Ppudan	pembiayaan :
b. Pencairon Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp c. Hasil Penjualah Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Hasil Penjualah Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Perubahan Rp d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah Setelah Perubahan Rp e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp f. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp f. Penerimaan Piutang Daerah 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Penerimaan Sejumlah Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp pembiayaan: a. Pembiatukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Sejula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penbertan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semula Rp 6. Penpertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semila Rp 6. Penpabayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp 4. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp 4. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Daerah Bala Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Daerah Bala Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Daerah Bala Obligasi Rp	 a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 1. Seriula Rp 17.563.738.509,00 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 35.119.796.577,00 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Setelah Peruhahan
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 3. Semula Rp 4. Semula Rp 6. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 3. Semula Rp 4. Semula Rp 4. Semula Rp 5. Semula Rp 6. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 6. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 3. Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 3. Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp 6. Penerimaan Piutang Daerah 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembenjayaan: a. Pembenjayaan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 3. Jumlah Pemberinakan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembenjayaan: a. Pembenjayaan Pemerintah Kota Bp 600.000.000.000 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembertan Modal Setelah Perubahan Rp 5. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp 5. Semula 6. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pembayarun Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayarun Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayarun Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp 3. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pembayaran Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pembayaran Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jurain Lebih lamit Perubahan Pangaran Ru	KD 50 600 505 005
C. Hasil, Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah Setelah Rp Perubahan Rp e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp f. Penerimaan Piutang Daerah 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Mp Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Rp Perubahan Rp 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembisyakan: a. Pembahtukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Beftambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Rp Peribahan Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semila Rp Jumlah Pembertanan Rp (100.000.000,00) 2. Bertambah / (Berkurang) Rp (100.000.000,00) 3. Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Sefinula Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Temporian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Temporian Pinjaman Daerah Batobigasi Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jumlah Pembayaran Cici	2. Bertambah / (Berkurang) _ Rp
2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah Setelah Perubahan Rp enerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. 1 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp f. Penerimaan Piutang Daerah Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp 7. Penerimaan Piutang Daerah Setelah Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp 3. Pengeluaran sebagsimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembintukan Dana Cudangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembernukan Dana Cadangan Setelah Rp Perubahan Penerimaan Modal (Investas) Pemerintah Kota 1. Semula Rp 6. Penyertaan Modal (Investas) Pemerintah Kota 1. Semila Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp (100.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp 3. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Pokok Utang 4. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Cicilian Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp 4. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Cicilian Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp 4. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Daer	c. Hasil Penjualan Kekayaan Dagrah yang disirah ke
d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Sernula Rp 2. Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah Setelah Perubahan Rp e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp f. Penerimaan Piutang Daerah 1. Semula Rp 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayakan: a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perübahan Rp i. Semula Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semila Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semila Rp c. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp Jumlah Pembayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp 4. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Sefiula Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp 3. Pasal 5 Uraian lebih lanjut Penubahan Anggaran Puda Pasal 5	2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dinisahlan Canada
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 3. Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Rerkurang) Rp 3. Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp 6. Penerimaan Piutang Daerah 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 3. Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp 6. Penerimaan Piutang Daerah Setelah Rp 7. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Penerimaan Pintang Daerah Setelah Perubahan Rp 8. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayasan: 2. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 3. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 4. Semula Rp 5. Penyertaan bah / (Berkurang) Rp 7. Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp 6. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semula Rp 600.000.000,000 2. Bertambah / (Berkurang) Rp (100.000.000,000) 3. Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp 6. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 7. Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang 7. Jaunlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang 7. Jaunlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang 7. Semula Rp 8. Pasal S	,Rp
2. Bertambah/(Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah Setelah Rp e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp f. Penerimaan Piutang Daerah 1. Semula Rp 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Rp Perubahan Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semula Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semula Rp 600.000.000,000 2. Bertambah / (Berkurang) Rp (100.000.000,000) Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp 500.000.000,000 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembertan Pinjaman Daerah Rp. 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Daerah Setelah Perubahan Pasal 5	d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp
Oumlah Penerimaan Pinjaman daerah Setelah Perubahan e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp f. Penerimaan Piutang Daerah 1. Semula Rp 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semula Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semula Rp Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp c. Pembayaran Pokok Utang L. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Semula Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Barasasa Rusasasa Rusasasa Rusasasa Rusasasa Rusasasasasa Rusasasasasasasasasasasasasasasasasasasa	
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp f. Penerimaan Piutang Daerah 1. Semula Rp 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembantukan Dana Cudangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semula Rp 600.000.000,000 2. Bertambah / (Berkurang) Rp (100.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jaruh Tempo Setelah Perubahan Rp d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Bertah Perubahan Pagaran Pasal 5 Uraian lebih lamut Perubahan Angarana Pasal 5 Uraian lebih lamut Perubahan Angarana Pasal 5	Jumlah Penerimaan Pinjaman deerah Satalah
2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pencrimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp f. Penerimaan Piutang Daerah 1. Semula Rp 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembejutukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semula Rp (500.000.000,000 2. Bertambah / (Berkurang) Rp (100.000.000,000 Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp 500.000.000,000 c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Daerah Setelah Perubahan Pagasasa Parah Serah Serah Pasal 5 Uraian lebih lamiut Perubahan Angasasa Parah	Rp
1. Penerimaan Piutang Daerah 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaian: a. Pembejutukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Sehula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Perubahan Rp Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Perubahan Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semila Rp 600.000.000,000 2. Bertambah / (Berkurang) Penubahan Rp (100.000.000,000 Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp 500.000.000,000 C. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Pumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp C. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Rouden Repubahan	2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan
1. Semula Rp 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayakan: a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semula Rp 600.000.000,00 2. Bertambah / (Berkurang) Rp (100.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Senfula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Daerah Setelah Perubahan Rp. Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Rock	1. Penerimaan Piutang Daerah
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bektambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perdibahan Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semula Rp 600.000.000,000 2. Bertambah / (Berkurang) Rp (100.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Daerah Setelah Perubahan	1. Semula Rp 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah
a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 1. Sejanula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perribahan Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semila Rp 600.000.000,000 2. Bertambah / (Berkurang) Rp (100.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Daerah Setelah Perubahan Pagararan Radan Pagararan Padan Padan Pagararan Padan Padan Padan Pagararan Padan Pada	Per ubanan Rn
Dittrilah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perribahan Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semula Rp 600.000.000,000 2. Bertambah / (Berkurang) Rp (100.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp 500.000.000,00 c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Daerah Setelah Perubahan Pasal 5 Uraian lebih lamut Perubahan Anggaran Parahan	a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp 1. Sejaula - Rp
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota 1. Semula Rp 600.000.000,000 2. Bertambah / (Berkurang) Rp (100.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp 500.000.000,000 c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Daerah Setelah Perubahan Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Radia dan Obligasi	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah
2. Berjambah / (Berkurang) Rp (100.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp 500.000.000,00 c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Daerah Setelah Perubahan Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Bandan dan dan dan dan dan dan dan dan da	b. Penyertaan Modal (Investası) Pemerintah Kota
c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp 1. Semula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Daerah Setelah Perubahan Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggeran Residuentah	2. Bertambah / (Berkurang) Rp (100.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp 500.000.000
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Serhula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Daerah Setelah Perubahan Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggeran Residuengan Residuengan Pasal Setelah Perubahan	c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula
d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 1. Serhula Rp 2. Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Rp Daerah Setelah Perubahan Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggeran Residue	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan
Daerah Setelah Perubahan Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggeren Bard	d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp 1. Semula Rp
Uraian lebih lanjut Peruhahan Anggaran Danda	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obliganian P
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud	Pasal 5
Qanun ini terdiri dari	Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK:	

2. Lampiran II ...

Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal <u>26 Oktober 2015 M</u> 13 Muharram 1437 H

Walikota langsa, 🕻

USMANGABDULLAH

Diundangkan di Langsa pada tanggal 26 Oktober 2015 M

13 Muharram 1437 H

EKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAHRUL THATE

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 10